

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah memasuki masa penguatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pihak termasuk pemerintah dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha menguatkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau di kenal dengan istilah *good governance* (Darwis dan Chairunnisa 2013). Hal tersebut yang mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang di laksanakan secara periodik.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki hak otonomi diwajibkan mempertanggung jawabkan kinerja kepada publik. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan wibawa menjadi perhatian Kota Bandar Lampung. Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berupa laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang di miliki oleh suatu entitas.

Laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik dengan membandingkan kinerja actual dan standar akuntansi dan menilai kondisi keuangan oleh pemakai laporan keuangan tersebut, membantu dalam tingkat kepatuhan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, juga membantu dalam tingkat efisiensi dan efektivitas. Untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan perbaikan pada pengelolaan

keuangan, dengan mengawasi kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan dapat di nilai baik apabila informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dapat di pahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan. Kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat di bandingkan dengan periode-periode yang ada sebelumnya.

Kualitas laporan keuangan dapat di lihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normative seperti yang di sebutkan dalam rerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara lain relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandbilty*). Apabila informasi dalam kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti syarat yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tersebut

Kompetensi sumber daya manusia dapat membantu mengetahui pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, efektif, efisien. Sehingga mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari kesalahan penyajian material dan pengertian yang menyesatkan. Wati, dkk (2014).

Penerapan standar akuntansi yang baik, akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah di pahami. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karna sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan juga di sajikan dengan jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah Wati, dkk (2014).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawban pelaksanaan APBD/APBN pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan terhadap informasi ataupun nilai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait tingkat kewajaran dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah telah memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Studi penelitian ini pada dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Fenomena terkait penelitian adalah opini WTP dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dearah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti- bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK. Oleh karenanya agar Laporan Keuangan Pemerintah Dearah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.

Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah memberikan

peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat menimbulkan kerugian negara/daerah. Administrasi keuangan yang buruk tersebut berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya. Tatakelola keuangan yang buruk menyebabkan ekonomi biaya tinggi: pelayanan kepada publik yang buruk, tingkat kerusakan fasilitas publik yang lebih cepat dan biaya transaksi yang tinggi. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan, dengan peningkatan kualitas SDM dan perbaikan peraturan dibidang manajemen keuangan daerah, menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Kenyataannya, informasi kualitas laporan keuangan khususnya di SKPD Kota Bandar Lampung yang menunjukkan perkembangan yang menurun terbukti dengan gagalnya capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fenomena yang sedang terjadi adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung gagal meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2021. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Lampung Andri Yogama membeberkan penyebab Pemkot Bandar Lampung tidak meraih WTP hal ini dikarenakan ada penggunaan restridikes sebesar Rp49 miliar, jadi penggunaan dana DAK digunakan untuk kegiatan lain. Selanjutnya, ada pencatatan hutang yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, ada catatan-catatan seperti pada umumnya ialah aset yang tidak tertib, kemudian ada kekurangan volume pada pekerjaan itu ada beberapa. (<https://lampung.suara.com>, 2023)

Hal tersebut bisa terjadi karena masih lemahnya sumber daya manusia yang kurang bertanggungjawab dalam mengelola laporan keuangan, masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan setiap pegawai bidang keuangan termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Fenomena yang dijumpai masih ditemukan kesenjangan antara kualitas sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Harus diakui masih ada permasalahan yang terjadi terhadap staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masih kurang memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi bahkan masih terdapat banyak

pegawai yang tidak memiliki latar pendidikan dari bidang akuntansi.

Penelitian terkait kualitas laporan keuangan Pemda telah dilakukan oleh Andini (2015), Pujanira (2017), dan Rahmadhani (2018) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Purnamasari (2019). Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian Purnamasari berada pada OPD kota Madiun.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Kota Bandar Lampung).**

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian lebih fokus dan terarah maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagian pengelola keuangan & asset daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung tahun 2022-2023.
2. Variable dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan variable independent yang akan diteliti adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM), standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

3. Apakah system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Membuktikan secara empiris kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Membuktikan secara empiris penerapan standar akuntansi keuangan pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Membuktikan secara empiris sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

hasil penelitian ini di harapkan dapat menghasilkan penelitian diantaranya :

1.5.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian memberikan pengetahuan serta referensi ilmu akuntansi sektor publik secara umum, serta sebagai literatur mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah.

1.5.2 Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sektor publik.

1.6 Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini akan membahas dan menyajikan hasil penelitian yang akan di susun dengan materi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penelitian tentang “pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah (Kota Bandar Lampung)”.
BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, kerangka berpikir, peneliti terdahulu yang di lakukan dalam penelitian dan akan membahas mengenai bangunan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan Teknik pengambilan sampel, variable penelitian dan definisi oprasional variable, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti mendemonstrasikan pengetahuan akademik yang dimiliki dan ketajaman daya fisiknya dalam menganalisis persoalan yang di bahas dengan mengikuti pedoman yang dijabarkan dalam teori.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitiandan saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya ataupun pihak yang bersangkutan dan pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN